

Operasionalisasi Moderasi Beragama dalam Penanggulangan Bencana: Analisis Berbasis Skenario untuk Aceh dan Sumatera pada November 2025

Yuli Safitri¹, Wirman², Katimin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: yuli4003243003@uinsu.ac.id¹, wirman@uinsu.ac.id², katimin@uinsu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran moderasi beragama dalam praktik penanggulangan bencana sebagai sumber dukungan psikospiritual dan fasilitator kerja sama lintas agama. Tujuan penelitian adalah menganalisis moderasi beragama sebagai “infrastruktur makna” dalam membangun ketahanan psikososial serta membandingkan pola implementasinya pada masyarakat religius homogen dan plural. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif multi-lokasi di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Aceh Tamiang melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dianalisis secara tematik komparatif. Temuan menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai modal sosial adaptif yang memperkuat pemulihan trauma, membangun kepercayaan antar kelompok, dan melengkapi pendekatan teknokratis kebencanaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka ketahanan bencana berbasis komunitas dengan menegaskan pentingnya integrasi nilai sosial-keagamaan lokal dalam tata kelola bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kerjasama Lintas Agama, Ketahanan Bencana, Modal Sosial, Moderasi Beragama, Psikososial.*

Operationalization of Religious Moderation in Disaster Response: A Scenario-Based Analysis for Aceh and Sumatra in November 2025

Abstract

This study examines the role of religious moderation in disaster management practices as a source of psychospiritual support and a facilitator of interfaith cooperation. The aim of the study is to analyze religious moderation as an “infrastructure of meaning” in building psychosocial resilience and to compare its implementation patterns in homogeneous and pluralistic religious communities. The study uses a multi-site qualitative case study in Langkat Regency and Aceh Tamiang Regency through interviews, observations, and document studies analyzed thematically. Findings indicate that religious moderation functions as adaptive social capital that strengthens trauma recovery, builds trust between groups, and complements technocratic disaster approaches. This study contributes to the development of a community-based disaster resilience framework by emphasizing the importance of integrating local socio-religious values into inclusive and sustainable disaster governance.

Keywords: *Interfaith Cooperation, Disaster Resilience, Social Capital, Religious Moderation, Psychosocial.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama, dengan enam agama resmi yang diakui negara serta berbagai kepercayaan lokal. Keberagaman ini seringkali menjadi kekuatan sosial-politik, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius dalam menjaga harmoni sosial di tengah rentannya potensi konflik antar-komunitas agama (Ridho, 2023). Moderasi beragama, yang menekankan sikap toleransi, inklusivitas, dan penalaran seimbang antar-pemeluk agama, telah diposisikan sebagai strategi kebijakan utama dalam upaya mempertahankan stabilitas sosial serta mencegah kekerasan berbasis agama di Indonesia (Muslich et al., 2024). Moderasi beragama pada tingkat makro juga telah diadopsi sebagai program prioritas Kementerian Agama RI yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024 sebagai respons terhadap meningkatnya intoleransi dan ekstremisme (Correia, 2024).

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia yang terletak di “cincin api Pasifik”, menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi secara berkala (Ha, 2025). BNPB mencatat tren peningkatan kejadian bencana hidrometeorologis dalam dekade terakhir, yang diperkirakan akan semakin intensif akibat dinamika iklim global (Data BNPB 2024). Dalam konteks ini, respons terhadap bencana alam telah menjadi agenda penting tidak hanya bagi aparat negara tetapi juga komunitas masyarakat sipil, termasuk komunitas keagamaan (Hidayah et al., 2024).

Namun demikian, penelitian kontemporer mengenai hubungan antara moderasi beragama dan mekanisme tanggap bencana di Indonesia masih sangat terbatas. Paradigma penanggulangan bencana nasional umumnya mengadopsi pendekatan teknokratis yang menekankan mekanisme administratif dan teknis, seringkali mengabaikan dimensi sosial-budaya dan religius yang berperan penting dalam kapasitas komunitas untuk bertahan dan membangun resiliensi pascabencana. Studi (Millah & Nasution, 2024) menunjukkan bahwa praktik keagamaan dan keterlibatan komunitas agama memiliki peranan signifikan dalam membentuk ketahanan individu dan komunitas pascabencana.

Urgensi penelitian ini terletak pada kesenjangan antara kebijakan moderasi beragama sebagai instrumen harmoni sosial dan *praktek konkret* keterlibatan nilai-nilai moderat dalam konteks tanggap bencana. Secara khusus, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana moderasi beragama dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat mekanisme tanggap bencana yang inklusif, toleran, dan kolaboratif di masyarakat plural. Kesenjangan ini penting karena meskipun kebijakan moderasi beragama telah berkembang, integrasi prinsip moderasi ke dalam tata kelola bencana nasional belum tervalidasi secara empiris dalam literatur ilmiah Indonesia.

Penelitian ini mengkaji bagaimana moderasi beragama dioperasionalisasikan dalam praktik tanggap bencana sebagai sumber dukungan psikospiritual, penguatan ketahanan mental, dan fasilitator kerja sama lintas agama. Fokus penelitian diarahkan pada pemaknaan dan praktik moderasi beragama oleh aktor keagamaan dalam konteks masyarakat religius homogen di Aceh Tamiang dan masyarakat plural di Langkat, serta perannya dalam pemulihan trauma, konstruksi makna bencana, dan pola kolaborasi antarumat beragama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis moderasi beragama sebagai “infrastruktur makna” dalam membangun ketahanan psikospiritual korban bencana, mengidentifikasi

perbedaan pola implementasi pada konteks sosial yang berbeda, menjelaskan mekanisme kerja sama lintas iman dalam situasi krisis, serta merumuskan implikasi konseptual dan rekomendasi kebijakan bagi penguatan tata kelola bencana yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai sosial-keagamaan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif multi-lokasi dengan pendekatan eksploratif dan komparatif yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kedua lokasi dipilih secara purposif untuk merepresentasikan perbedaan konteks sosio-religius, yakni masyarakat plural dengan keragaman agama dan etnis di Langkat serta masyarakat homogen-religius di Aceh Tamiang yang menerapkan Syariat Islam dalam kerangka Otonomi Khusus. Desain ini memungkinkan pendalaman konteks praktik moderasi beragama dalam penanggulangan bencana sekaligus perbandingan antarwilayah.

Unit analisis penelitian difokuskan pada proses dan praktik sosial moderasi beragama dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, meliputi tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Analisis mencakup peran aktor, institusi, serta narasi dan diskursus keagamaan yang berkembang di ruang publik, sehingga dapat diidentifikasi pola, mekanisme, tantangan, serta prinsip moderasi beragama yang bersifat universal maupun kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipan dan non-partisipan, serta studi dokumen dan analisis tekstual (Assinghly, 2021). Data dianalisis menggunakan analisis tematik komparatif melalui tahapan transkripsi, koding, pengembangan tema, serta analisis intra dan antar kasus yang diverifikasi melalui member checking. Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dan menyadari keterbatasan metodologis, dengan harapan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan relevan bagi perumusan kebijakan penguatan moderasi beragama dalam penanggulangan bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dukungan Psikospiritual Berbasis Nilai Moderasi: Mereframing Trauma dan Membangun Ketahanan Mental

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama berperan signifikan sebagai sumber dukungan psikospiritual dalam pemulihan trauma dan penguatan ketahanan mental korban bencana. Ketika layanan psikososial formal sulit diakses atau mengalami stigma, praktik keagamaan yang moderat menjadi alternatif yang diterima secara kultural dan emosional oleh masyarakat terdampak.

Wilayah Aceh Tamiang, dukungan psikospiritual diorganisasikan secara terstruktur melalui jaringan dayah dan tokoh agama lokal. Pemulihan trauma dilakukan dengan memadukan ritual kolektif dan tafsir keagamaan yang moderat. Setelah fase tanggap darurat, pengajian tasawuf dan zikir pascabencana diselenggarakan secara rutin sebagai ruang terapi komunal. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ibadah, tetapi juga

sebagai wadah aman untuk mengekspresikan kesedihan, kehilangan, dan kecemasan secara kolektif. Korban didorong untuk mengungkapkan emosi dalam suasana religius yang tenang dan suportif, sehingga proses pemulihan berlangsung tanpa tekanan atau stigma.

Peneliti menemukan praktik konsisten penggeseran narasi keagamaan dari pemaknaan bencana sebagai '*azāb* (hukuman) menuju *ibtilā'* (ujian). Para tokoh agama secara sadar menekankan bahwa bencana merupakan ujian kesabaran dan solidaritas bersama, bukan hukuman individual. Narasi ini diterima luas oleh masyarakat dan berperan dalam mengurangi rasa bersalah, stigma, serta kecenderungan menyalahkan korban. Pendampingan psikospiritual juga dilakukan melalui pendekatan silaturahmi, di mana santri dayah mengunjungi rumah-rumah korban secara rutin dengan pola komunikasi informal, seperti mengaji bersama atau sekadar menanyakan kabar. Pendekatan ini menciptakan ruang dialog yang lebih cair dan tidak menakutkan bagi korban trauma.

Wilayah Langkat, dukungan psikospiritual berkembang dalam konteks masyarakat yang plural secara agama. Praktik moderasi beragama diwujudkan melalui pendekatan lintas iman dengan menggunakan bahasa universal yang menekankan harapan, ketahanan, dan penemuan makna hidup. FKUB memfasilitasi pembentukan kelompok konseling peer-to-peer lintas agama yang terdiri dari relawan muda berbagai latar belakang keagamaan. Relawan ini dilatih dasar-dasar trauma healing dan berperan sebagai pendengar sebaya bagi korban.

Selain konseling, ditemukan pula pemanfaatan seni dan ibadah sebagai media ekspresi psikologis. Gereja menyelenggarakan kegiatan melukis dan menulis bagi anak-anak, sementara masjid mengadakan kegiatan religius yang bersifat membangun semangat dan rasa aman. Sesi penemuan makna bersama yang melibatkan pembacaan teks keagamaan dari berbagai tradisi menjadi ruang refleksi kolektif yang menegaskan ketabahan dan pengharapan sebagai nilai bersama lintas iman.

Kerja Sama Lintas Agama dan Keyakinan: Dari Ko-eksistensi ke Ko-operasi Aktif

Temuan penelitian menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam relasi antarumat beragama, khususnya di Langkat, dari ko-eksistensi pasif menjadi ko-operasi aktif selama fase tanggap bencana. Bencana menjadi konteks yang mendorong aktor-aktor keagamaan untuk melampaui batas identitas dan bekerja sama secara fungsional.

FKUB berperan sentral sebagai simpul koordinasi lapangan. Forum ini tidak hanya menjalankan fungsi simbolik atau dialog rutin, tetapi berkembang menjadi ruang pengambilan keputusan praktis terkait distribusi bantuan, pendataan korban, dan pengelolaan relawan. Pembagian peran dilakukan berdasarkan kapabilitas dan sumber daya masing-masing lembaga keagamaan. Gereja Katolik menyediakan gedung dan sistem pendataan korban, masjid menjadi pusat logistik dan dapur umum, vihara menyediakan tenaga kesehatan dan obat-obatan, sementara gereja Protestan mengelola layanan konseling dan pendampingan anak.

Praktik inklusivitas simbolik ditemukan menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan. Di posko yang berada di lingkungan gereja disediakan ruang shalat dengan arah kiblat yang jelas, sementara bantuan dari masjid dipilah dan diberi label khusus untuk menghormati kebutuhan non-Muslim. Komunikasi publik terkait informasi darurat

disampaikan secara bersama oleh para pemuka agama lintas iman, sehingga pesan memiliki legitimasi yang lebih luas dan mengurangi potensi kecurigaan.

Tantangan Implementasi: Jurang antara Ideal Moderasi dan Realitas di Lapangan

Meskipun praktik moderasi beragama menunjukkan potensi besar, penelitian ini menemukan berbagai tantangan struktural dan kultural dalam implementasinya. Tantangan pertama adalah fragmentasi internal dan kompetisi antar lembaga keagamaan. Di Aceh Tamiang, terdapat persaingan terselubung antara dayah tradisional dan majelis taklim modern dalam menunjukkan peran dan kinerja bantuan. Di Langkat, beberapa gereja kecil merasa kurang terlibat secara proporsional dibanding gereja yang lebih besar.

Tantangan kedua adalah ketergantungan yang tinggi pada figur tokoh agama. Efektivitas praktik moderasi sangat bergantung pada kharisma, komitmen, dan jejaring personal tokoh kunci. Ketika figur ini tidak aktif atau berpindah peran, koordinasi dan semangat kolaborasi berpotensi melemah karena belum didukung oleh sistem kelembagaan yang mapan.

Tantangan lainnya muncul dalam pengelolaan bantuan eksternal. Bantuan dari organisasi keagamaan luar daerah atau internasional sering membawa nilai, simbol, dan prosedur sendiri yang tidak selalu sejalan dengan prinsip lokal yang telah disepakati. Situasi ini berpotensi memicu ketegangan dan kecurigaan di tingkat komunitas. Selain itu, relawan dan tokoh agama juga menghadapi kelelahan fisik dan emosional akibat keterlibatan jangka panjang, sementara dukungan psikologis bagi para penolong ini relatif minim.

Dilema otoritas ganda juga menjadi kendala, khususnya di Aceh Tamiang, ketika relawan dayah harus merespons arahan dari pimpinan keagamaan dan aparat pemerintahan secara bersamaan. Perbedaan instruksi kerap menimbulkan kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaan tanggap bencana.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai *infrastructure of meaning* yang memungkinkan korban bencana mereframing pengalaman traumatis dalam kerangka makna religius dan sosial yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan temuan Feener et al. (2011) yang menunjukkan peran sentral otoritas dan jaringan keagamaan dalam pemulihan sosial Aceh pascatsunami, di mana agama menjadi sumber legitimasi, solidaritas, dan ketahanan komunitas.

Pendekatan psikospiritual berbasis ritual kolektif dan narasi *ibtilā'* di Aceh Tamiang memperkuat argumen Koenig (2020) bahwa religiositas yang adaptif dan tidak menghakimi berkontribusi signifikan terhadap pemulihan kesehatan mental pascatrauma. Sementara itu, praktik lintas iman di Langkat mengonfirmasi analisis Gaillard dan Texier (2010) yang menekankan pentingnya modal sosial dan kerja sama berbasis nilai lokal dalam meningkatkan efektivitas respons bencana di masyarakat plural.

Transformasi dari ko-eksistensi menuju ko-operasi aktif menunjukkan bahwa bencana berfungsi sebagai katalis pembentukan *expanded moral community*, di mana batas identitas keagamaan melunak demi tujuan kemanusiaan bersama. Namun, ketergantungan pada figur dan lemahnya pelembagaan mengindikasikan bahwa moderasi beragama belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, sebagaimana dikritisi Gaillard bahwa keberlanjutan

resiliensi berbasis komunitas memerlukan integrasi antara aktor lokal dan sistem kebijakan formal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar norma etis, tetapi praktik sosial yang berdaya guna dalam penanggulangan bencana, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan dalam keberlanjutannya.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme sosial-kultural yang operasional dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam memperkuat ketahanan psikososial, membangun kepercayaan lintas kelompok, dan memfasilitasi kerja sama komunitas pada situasi krisis. Temuan empiris menunjukkan bahwa nilai dan praktik moderasi beragama berperan sebagai modal sosial adaptif yang melengkapi pendekatan teknokratis kebencanaan, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi kajian ketahanan bencana berbasis komunitas melalui integrasi perspektif sosiologi agama dan disaster studies. Dengan demikian, ketahanan bencana di Indonesia tidak dapat bertumpu pada adopsi model global semata, tetapi memerlukan penguatan model lokal yang berakar pada struktur sosial dan praktik keagamaan masyarakat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya integrasi aktor dan nilai moderasi beragama ke dalam tata kelola penanggulangan bencana melalui penguatan peran kelembagaan keagamaan dan koordinasinya dengan otoritas formal. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan fase bencana yang diteliti, serta pada ketergantungan praktik moderasi terhadap figur tokoh agama, sehingga generalisasi temuan masih bersifat kontekstual. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji pelembagaan moderasi beragama dalam sistem kebencanaan formal dan keberlanjutannya dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, R. S. (2000). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Bankoff, G. (2019). Remaking the world in our own image: Vulnerability, resilience, and adaptation as historical discourses. *Disasters*, 43(2), 221–247.
- Benthall, J. (2016). Islamic charities and disaster relief. In *The Routledge handbook of religions and global development* (pp. 301–314). Routledge.
- Berger, P. L. (2014). *The many altars of modernity: Toward a paradigm for religion in a pluralist age*. De Gruyter.
- Bradley, T. (2015). A feminist theoretical approach to the study of religion and disaster. In *Religion and disaster* (pp. 27–40). Palgrave Macmillan.
- Chester, D. K., & Duncan, A. M. (2010). The Bible, theodicy, and volcanoes: A historical analysis of the interaction between theology, science, and risk perception in the Mediterranean. In *Living under the shadow* (pp. 11–38). Routledge.

- Clarke, M., & Tittensor, D. (Eds.). (2014). *Islam and development: Exploring the invisible aid economy*. Routledge.
- Correia, S. (2024). Kebijakan Kementerian Agama tentang Penguatan Moderasi Beragama. *Jurnal Ilmiah Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen*, 1(2). <https://jurnalbenoalekot.com/index.php/ben/article/download/3/12>
- De Cordier, B. (2009). The 'humanitarian frontline', development and relief, and religion: What context, which threats and which opportunities? *Third World Quarterly*, 30(4), 663–684.
- Feener, R. M., Daly, P., & Reid, A. (Eds.). (2011). *Mapping the Acehnese past*. KITLV Press.
- Gaillard, J. C., & Texier, P. (2010). Religions, natural hazards, and disasters: A review. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 28(1), 5–33.
- Ha, K. (2025). Including Faith Communities in Disaster Recovery Phase via Religious Diversity : Qualitative Descriptive Analysis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 24(1), 105–136. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art4>
- Hasyim, S. (2021). *Religious diversity and state–religion relations in Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Hidayah, A., Islam, U., Raden, N., Said, M., Fauziyah, N. R., Islam, U., Indonesia, I., Wibowo, W., Islam, U., & Indonesia, I. (2024). The Role of the State in Fostering Religious Harmony in Indonesia: a Historical Review, Challenges and Policy Towards Moderation. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 7170, 1–36. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v5i1.9181>
- Millah, C. U., & Nasution, E. M. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia : Konsep Dasar dan Pengaruhnya. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.2707>
- Muslich, A., Maulana, R., & Nikmah, D. D. (2024). Disasters and Religious Resilience in Indonesia: A Review. *JSA: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 21–35. <https://doi.org/10.19109/jsa.v8i1.21900>
- Koenig, H. G. (2018). *Religion and mental health: Research and clinical applications*. Academic Press.
- Nawawi, N., & Jamil, M. (2023). Moderasi beragama dalam praktik: Studi tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam penanganan bencana banjir. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 19(2), 112–130.
- Ridho, M. (2023). Social Construction of Religious Attitude towards Disaster among Victims of Natural Disasters in Palu and Lombok. *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, VII(1), 17–39. <https://doi.org/10.21093lentera>
- Sakai, A., & Fauzia, A. (2020). Cultural and religious practices in disaster risk reduction: Case studies from West Sumatra and Yogyakarta. In *Routledge handbook of religion and disasters* (pp. 215–230). Routledge.
- Schlehe, J. (2010). Anthropology of religion: Disasters and the representations of tradition and modernity. *Religion*, 40(2), 112–120.
- Titon, H. (2022). The role of dayah in post-tsunami Aceh: Religious education and social reconstruction. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(1), 45–67.